

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15 /SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

1. Direksi

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Anggota Direksi Perusahaan berdomisili di Indonesia.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing baik langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.	Ya				Tidak
3.	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap.	Ya				Tidak
4.	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.	Ya				Tidak
5.	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.	1	2	3	4	5
6.	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi di perusahaan lain.	Ya				Tidak
7.	Setiap anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
8.	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.	1	2	3	4	5
9.	Direksi bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
10.	Direksi mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan Lainnya daripada kepentingan pribadi.	1	2	3	4	5
11.	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
12.	Direksi mampu bersifat objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
13.	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.	1	2	3	4	5
14.	Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.	1	2	3	4	5
15.	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
16.	Direksi telah memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak khususnya kepentingan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
17.	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	2	3	4	5
18.	Direksi telah membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan dan DPS.	1	2	3	4	5
19.	Direksi mampu menghindari transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
20.	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
21.	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	1	2	3	4	5
22.	Direksi mampu untuk menghindari permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.	1	2	3	4	5
23.	Direksi mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.	Ya				Tidak
24.	Direksi Perusahaan menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Ya				Tidak
25.	Direksi menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.	Ya				Tidak
26.	Hasil rapat Direksi dituangkan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	dalam risalah rapat Direksi.					
27.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	1	2	3	4	5
28.	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ) yang terjadi secara jelas.	1	2	3	4	5
29.	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
30.	Direksi mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	1	2	3	4	5

2. Dewan Komisaris

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Ya				Tidak
2.	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin berkerja dari	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	instansi berwenang.					
3.	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.	Ya				Tidak
4.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.	Ya				Tidak
5.	Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.	Ya				Tidak
6.	Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.	Ya				Tidak
7.	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.	1	2	3	4	5
8.	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.	1	2	3	4	5
9.	Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
10.	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.					
11.	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5
12.	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	2	3	4	5
13.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
14.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
15.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan	1	2	3	4	5



No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.					
16.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	1	2	3	4	5
17.	Dewan Komisaris membentuk komite lain selain komite audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Ya				Tidak
18.	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Ya				Tidak
19.	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.	Ya				Tidak
20.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5
21.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
22.	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ) yang terjadi secara jelas.	1	2	3	4	5
23.	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
24.	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	1	2	3	4	5

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Diisi hanya oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah).

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.	Ya				Tidak
2.	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.	Ya				Tidak
3.	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
4.	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.	1	2	3	4	5
5.	Anggota DPS telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.	Ya				Tidak
6.	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang sama.	Ya				Tidak
7.	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.	Ya				Tidak
8.	Anggota DPS mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.	Ya				Tidak
9.	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.	1	2	3	4	5
10.	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, UUS dan/atau pemangku	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	kepentingan lainnya.					
11.	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, UUS dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.	1	2	3	4	5
12.	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, UUS dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
13.	DPS mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
14.	DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
15.	DPS mampu menjalankan tanggung jawab berupa pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan prinsip syariah.	1	2	3	4	5
16.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan Pembiayaan Syariah.	1	2	3	4	5
17.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
18.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
19.	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	Ya				Tidak
20.	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	Pembiayaan Syariah dan UUS secara lengkap dan tepat waktu.					
21.	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.	Ya				Tidak
22.	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.	1	2	3	4	5
23.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	1	2	3	4	5
24.	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ) yang terjadi secara jelas.	1	2	3	4	5
25.	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
26.	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
27.	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
28.	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.	1	2	3	4	5
29.	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan dan UUS, dan praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
30.	DPS melaporkan secara	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan Prinsip Syariah oleh Direksi.					
31.	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	2	3	4	5

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal

a. Bagi Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki komite audit.	Ya				Tidak
2.	Ketua komite audit ialah salah seorang Komisaris Independen.	Ya				Tidak
3.	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan	1	2	3	4	5



No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	efektifitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.					
4.	Dewan Komisaris membentuk komite lain selain komite audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Ya				Tidak
5.	Perusahaan memiliki struktur komite.	Ya				Tidak
6.	Setiap anggota komite memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	Ya				Tidak
7.	Komite audit secara rutin melakukan rapat.	1	2	3	4	5
8.	Komite audit memiliki program kerja komite.	Ya				Tidak
9.	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite.	Ya				Tidak

b. Bagi Perusahaan yang memiliki total aset kurang dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
2.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.	1	2	3	4	5
3.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	1	2	3	4	5
4.	Perusahaan membentuk satuan kerja lain untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Ya				Tidak
5.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.	Ya				Tidak
6.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	Ya				Tidak
7.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.	1	2	3	4	5
8.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
9.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.	Ya				Tidak

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.	Ya				Tidak
3.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5
4.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.	1	2	3	4	5
5.	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	membantu Direksi dalam memastikan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.					
6.	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	2	3	4	5

2. Fungsi auditor internal

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki auditor internal.	Ya				Tidak
2.	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.	Ya				Tidak
3.	Auditor internal memiliki struktur organisasi.	Ya				Tidak
4.	Auditor internal bersifat independen.	Ya				Tidak
5.	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.	Ya				Tidak

3. Fungsi auditor eksternal

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.	Ya				Tidak
2.	Auditor eksternal diajukan oleh	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	Dewan Komisaris atas usul komite audit.					
3.	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.	Ya				Tidak
4.	Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan auditor eksternal.	Ya				Tidak
5.	Auditor eksternal bersifat independen.	Ya				Tidak
6.	Perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama dalam 6 (enam) tahun terakhir.	Ya				Tidak

D. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern

1. Pelaksanaan tugas pokok Komisaris Independen

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.	Ya				Tidak
2.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.	Ya				Tidak

2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menerapkan	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.					
2.	Pengawasan aktif terhadap Dewan Komisaris dan Direksi termasuk melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko.	1	2	3	4	5
3.	Perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko secara efektif.	1	2	4	5	5
4.	Manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.	1	2	4	5	5

3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.	Ya				Tidak
2.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan prosedur dalam pengelolaan risiko.	Ya				Tidak
3.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.	Ya				Tidak

4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.	Ya				Tidak
2.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.	Ya				Tidak
3.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.	Ya				Tidak

5. Sistem informasi manajemen risiko

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional di bidang pembiayaan.	Ya				Tidak
2.	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan finansial dibidang pembiayaan.	Ya				Tidak
3.	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai ketaatan atas peraturan perundang-undangan dibidang pembiayaan.	Ya				Tidak

6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilaksanakan secara optimal.	1	2	3	4	5
2.	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.	Ya				Tidak

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian ( <i>prudent behaviour</i> ) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap debitor, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
2.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	2	3	4	5
3.	Kebijakan remunerasi	1	2	3	4	5



No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	memperhatikan prestasi kerja individual.					
4.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara ( <i>peer group</i> ).	1	2	3	4	5
5.	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.	1	2	3	4	5
6.	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.	Ya				Tidak
7.	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.	Ya				Tidak

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak
2.	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
3.	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.	Ya				Tidak

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.	Ya				Tidak

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	1	2	3	4	5
2.	Perusahaan memberikan data dan informasi kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu.	1	2	3	4	5
3.	Perusahaan menjelaskan perjanjian pembiayaan serta hak dan kewajiban debitur dalam setiap transaksi pembiayaan.	1	2	3	4	5
4.	Perusahaan memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	1	2	3	4	5
5.	Perusahaan melakukan promosi	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	tentang jasa pembiayaan.					
6.	Perusahaan secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada debitur.	Ya				Tidak

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menyusun rencana jangka panjang Perusahaan.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan menyusun rencana kerja Perusahaan.	Ya				Tidak
3.	Perusahaan menyusun anggaran tahunan Perusahaan.	Ya				Tidak
4.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan disampaikan kepada OJK.	Ya				Tidak

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan pembiayaan lain.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
3.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan jasa keuangan selain Perusahaan pembiayaan.	Ya			Tidak
4.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.	Ya			Tidak

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Perusahaan melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	Ya			Tidak
2.	Perusahaan melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	Ya			Tidak

J. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Dewan Komisaris

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Perusahaan melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	Ya			Tidak
2.	Perusahaan melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	Ya			Tidak

K. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK

1. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen, DPS, dan/atau auditor eksternal

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.	Ya			Tidak
2.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan	Ya			Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.					
3.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri Komisaris Independen.	Ya				Tidak
4.	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.	Ya				Tidak
5.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian Komisaris Independen.	Ya				Tidak
6.	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada OJK.	Ya				Tidak
7.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri DPS.	Ya				Tidak
8.	DPS yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.	Ya				Tidak
9.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian DPS.	Ya				Tidak
10.	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian DPS Kepada OJK.	Ya				Tidak
11.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri auditor eksternal.	Ya				Tidak
12.	Auditor eksternal yang	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.					
13.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian auditor eksternal.	Ya				Tidak
14.	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal Kepada OJK.	Ya				Tidak

2. Transaksi material dengan pihak terkait

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait transaksi material dengan pihak lain.	Ya				Tidak

3. Benturan kepentingan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait transaksi Perusahaan yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan lain.	Ya				Tidak

4. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Perusahaan.	1	2	3	4	5
2.	Tidak terdapat perselisihan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	internal dalam Perusahaan.					
3.	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Perusahaan.	1	2	3	4	5

5. Penyimpangan intern

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS.	Ya				Tidak
2.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.	Ya				Tidak
3.	Terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.	Ya				Tidak
4.	Perusahaan menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	Ya				Tidak
5.	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.	1	2	3	4	5

6. Permasalahan hukum

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.	Ya				Tidak



7. Etika bisnis

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	1	2	3	4	5
2.	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	1	2	3	4	5
3.	Perusahaan memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.	Ya				Tidak

L. Kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*)

Uraian kesimpulan umum
------------------------

Menyetujui,

DIREKSI

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana